

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghilangkan salah persepsi yang mungkin timbul, ada baiknya penulis menjelaskan arti dan maksud judul penelitian di atas, agar permasalahan yang hendak dikaji menjadi semakin jelas. Istilah-Istilah yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan secara harfiah adalah membuat (seseorang) berdaya. Istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (*empowerment*). Menurut Tjandraningsih, dalam pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang-orang yang di berdayakan untuk meraih keberdayaannya.¹ Pemberdayaan yang di maksud disini sejalan dengan maksud Tjandraningsih, yaitu pemberdayaan yang membuat masyarakat sadar akan usaha sendiri.

Perempuan adalah seorang yang bernama manusia yang mempunyai jenis kelamin dengan tanda vagina, memiliki uterus, ovarium, dan plasenta.² Ada definisi lain tentang perempuan yakni sebagaimana yang didefinisikan oleh Krisna Shen, bahwa kata perempuan itu berasal

¹ Tjandraningsih Indrasari, *Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak Dehumanisasi Anak Marjinal*, Surya Mulandar (ed), (Bandung: Yayasan Akatiga, 1995), hal. 3

² J.S. Badudu dan Sutan M. Zain, *HUBI* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 1041.

dari kata “*empu*” (melayu) artinya pusat kehidupan (*the center of live*) sedangkan wanita berasal dari kata “*wan*” (sankrit) yang berarti sesuatu yang dinafsui (*something to be desired of*).³

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah upaya meningkatkan kaum perempuan baik secara intelektual, kepribadian atau keterampilan dengan usaha tersebut diharapkan menempatkan peran perempuan seimbangan dengan laki-laki dan terjalin hubungan antara keduanya sama-sama (*equal*) dalam keluarga dan masyarakat.

Jadi pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan baik dari sisi intelektual, kepribadian, ketrampilan, material, maupun spiritual, sehingga mereka mampu melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dengan usaha tersebut terjalin hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan secara seimbang (*equal*) dalam keluarga dan masyarakat.

3. Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF)

Yayasan Kesejahteraan Fatayat disingkat YKF adalah sebuah lembaga nirlaba yang memiliki kepedulian untuk mengatasi ketimpangan hak-hak reproduksi dan hak-hak politik perempuan.⁴

³ Dikutip dari Tamrin Amal Tamagola, *Citra Wanita dalam Iklan dalam Majalah Wanita Indonesia*, Edisi : xxii, 1997), hal.

⁴ Majalah, *Fatayat Welfare Foundation*, (Yogyakarta : YKF, Email : ykfjogja @ indosat.net. id)

4. Pesantren

Pesantren yaitu sebuah asrama pendidikan Islam tradisi tradisional dimana para siswanya tinggal bersama, belajar dibawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih di kenal dengan sebutan “*kyai*”.⁵

Adapun penelitian ini dilakukan diempat pondok pesantren yaitu : *pertama*, pondok pesantren Ali Ma'sum yang berlokasi di Yogyakarta, *kedua*, pondok pesantren Nurul Ummahat yang berlokasi di kota Gede Yogyakarta, *ketiga* pondok pesantren Wahid Hasyim yang berlokasi di Condong Catur Yogyakarta, *keempat* pondok pesantren Al- Barokah yang berlokasi di Karang Waru Sleman Yogyakarta. Keempat pondok pesantren tersebut dipandang representatif, mengingat keempat pondok pesantren ini pernah mengikuti pelatihan wacana gender dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) dalam rangka pemberdayaan perempuan, adanya letak strategis memungkinkan waktu dan jangkaun penulis dalam penelitian ini.

Dari penggalan beberapa istilah-istilah di atas, maka maksud dan arti dari judul “Pemberdayaan Perempuan Oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) di Pondok Pesantren Yogyakarta” (melalui penguatan hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan) adalah Penelitian terhadap berbagai aktivitas yang di lakukan oleh YKF dalam memberdayakan perempuan di berbagai pondok pesantren di Yogyakarta. Dalam penelitian ini difokuskan pada aktivitas YKF pada periode kepengurusan 2000-2002.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta : LP3ES, 1985) hal. 44.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep penting yang perlu dipahami dalam memperbincangkan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan pada kehidupan masyarakat, adalah konsep gender (baca : jender). Hal itu untuk melakukan analisis terhadap persoalan ketidakseimbangan yang terjadi pada pola hubungan tersebut.⁶ Gender menurut Mansour Fakih yaitu “suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. dan sifat tersebut dapat dipertukarkan. Sifat tersebut misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan, sedang laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.⁷ Dapat dikatakan pula gender merupakan perbedaan perilaku (*behaviorial difference*) antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Gender sebagaimana pengertian tersebut menunjukkan perbedaan yang bukan biologis,⁸ atau kodrat Tuhan yaitu bukan perbedaan jenis kelamin yang merupakan ketentuan dari Tuhan yang tidak dapat dirubah.

Sementara kita dapat melihat kondisi perempuan akibat adanya pemahaman yang keliru antara konsep gender dan kodrat Tuhan, sifat yang

⁶ Dikatakan pula oleh Ginanjar Kartasasmita, gender apabila dikuatkan kondisi; operasional berarti merupakan konstruksi sosial yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui sosialisasi dan diberi sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan. Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Penerapan*. (Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 1996), hal. 199.

⁷ Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 8.

⁸ M.I Anderson, *Thinking About Women Sociological Perspectives On Sex and Gender*, (London : Macmillen Publishing Company, 1993), hal. 48.

semestinya merupakan hasil konstruksi yang dianggap sebagai kodrat. Misalnya perempuan dianggap sebagai makhluk yang emosional, ditunjukkan dengan perempuan mudah menangis. Mereka dianggap tidak dapat memutuskan persoalan secara rasional, baik itu pengambilan keputusan dalam rumah tangga, masyarakat ataupun persoalan yang lebih luas yaitu urusan negara. Bahkan perempuan tidak dapat memutuskan yang berhubungan dengan dirinya sendiri, misalnya dalam pernikahan ataupun yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya. Hal tersebut berakibat juga adanya anggapan, perempuan sebagai makhluk yang lemah secara intelektual, dilain pihak ini dapat dikatakan wajar karena rata-rata kaum perempuan berpendidikan rendah, serta adanya anggapan dalam keluarga bahwa “perempuan akhirnya akan ke dapur juga”.⁹

Sebenarnya perbedaan gender tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun yang terjadi sebaliknya, gender justru menggiring dan melahirkan sikap dan praktek yang mendiskriminasi perempuan. Sikap dan praktek diskriminatif ini menyiratkan hubungan yang bersifat politis (hubungan kekuasaan) antara laki-laki dan perempuan. Di mana hubungan kekuasaan dalam hal ini adalah hubungan dominasi dan subordinasi. Perempuan dalam hubungan seperti itu, berada pada posisi subordinatif.¹⁰ Inilah yang terjadi dalam masyarakat bahwa perempuan

⁹ Yustina Rustiawati, *Perempuan dan Pemberdayaan*, (Jakarta : Obor, 1997), hal.295.

¹⁰ Zakiyudin, Baidhowi, *Perspektif Agama-agama, Geografis, Teori-teori Wacana Teologi Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 8.

merupakan warga kelas dua dan posisinya lemah di banding dengan laki-laki dalam sistem patriarkhi yang kuat, perempuan ada dalam posisi yang subordinatif.¹¹

Budaya patriarkhi merupakan suatu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat yang memihak pada laki-laki, karena laki-laki di anggap lebih kuat dan lebih rasional sehingga berhak untuk mendominasi atau melindungi perempuan sebagai makhluk irasional dan lemah. Sistem nilai patriarkhi menempatkan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Sistem patriarkhi dapat di temui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada perempuan kelas bawah maupun atas, di rumah, di tempat kerja dan di komunitas yang lebih luas. Wujud dan intensitas subordinasi bervariasi. Namun pada dasarnya sama, mengandung salah satu atau lebih unsur-unsur yang merendahkan perempuan, seperti: diskriminasi kurang di hargai, kontrol, pemerasan, penindasan, dan kekerasan.¹²

Perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun karena konstruksi sosial budaya semacam itu telah menjadi kebiasaan dalam waktu yang sangat lama, maka kemudian perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat bahkan

¹¹ Kamla Bashin, *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Bentang, 1993), hal. 3.

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 9.

negara. Perbedaan gender di anggap ketentuan Tuhan yang tidak dapat di ubah dan bersifat kodrati. Dan tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan konstruksi sosial budaya yang mengakibatkan ketidakadilan gender tersebut adalah pemahaman agama.

Jadi sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender di karenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa dirubah lagi, sedang perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Secara ekonomi prioritas pendidikan dalam keluarga diberikan pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Pandangan demikian juga memperkuat urusan rumah tangga (*domestik*) atau yang terkenal dengan *macak* dan *manak* urusan kaum perempuan dan pekerjaan di luar rumah (*publik*) adalah urusan kaum laki-laki. Melihat kondisi sekarang, tidak sedikit kaum perempuan yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Namun kenyataannya dilihat dari peran perempuan hal tersebut semakin menambah beban yang berakibat adanya peran ganda (*domestik dan publik*).

Pelabelan terhadap kaum perempuan juga selama ini menjadi masalah dan beban psikologis bagi kaum perempuan, misalnya perempuan yang keluar malam dianggap sebagai hal yang negatif atau perempuan yang berdandan mencolok dianggap menggoda laki-laki. Hal ini juga mengakibatkan adanya anggapan bahwa penyebab pemerkosaan karena kaum perempuan suka keluar malam dan berdandan yang mencolok.¹³

Hal tersebut di atas sebagai gambaran, bagaimana posisi dan kondisi kaum perempuan selama ini dalam keluarga ataupun masyarakat. Kondisi tersebut merupakan hasil dari sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat yang akhirnya membentuk *image* hubungan antara laki-laki dan perempuan telah terdapat perbedaan peran dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini perlu diadakan usaha untuk merubah pola hubungan yang tidak seimbang tersebut dengan meningkatkan kemampuan atau memberdayakan kaum perempuan.

Berawal dari suatu kenyataan bahwa keinginan mewujudkan kemitrasejajaran dan kesetaraan masih merupakan sesuatu yang normatif dan belum didukung secara nyata dan aktual oleh setiap laki-laki dan perempuan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan orang masih terpaku pada pelabelan (*stereotyping*) pada hak dan kedudukan perempuan yang justru tidak mendukung kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Karenanya pemahaman yang tepat tentang kesetaraan dan keadilan yang didasarkan pada ajaran agama akan menjadi landasan yang sangat diperlukan

¹³ N. Daldjoeni, "Perempuan sudah di lecehkan masih dituduh mengiming-iming" , *KOMPAS*, 31 Oktober 1994.

agar jurang antar apa yang normatif tentang kemitrasejajaran dan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang aktual (relasi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari) menjadi makin kecil.¹⁴

Peletakan perempuan dalam satu sektor domestik di pandang banyak kalangan sebagai upaya marginalisasi kaum laki-laki terhadap seluruh potensi perempuan. Hal ini sangat kentara adalah pada teks-teks ajaran agama yang ditafsirkan dalam perspektif maskulin. Seperti kelahiran Hawa dari sebagian organ tubuh Adam bukan berarti Hawa lebih rendah dari pada Adam. Sachiko Murata (1996) menyebutkan bahwa hubungan Adam terhadap Hawa adalah sikap yang melindungi karena Hawa berasal dari Adam dan merupakan bagian dari Adam. Sementara kerinduan Hawa terhadap Adam disebabkan kesadaran Hawa bahwa Adam adalah tempat asalnya. Tidak ada dominasi atau resesivitas dalam hubungan gender keduanya komplementer.¹⁵

Kesalahan fiqih sosial yang berkembang adalah tidak dilibatkannya potensi manusia (perempuan) yang sama-sama mempunyai hak. Peran perempuan dianggap sebagai peran kedua, sekalipun banyak perempuan yang berhasil sejajar bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Dalam menentukan fiqih-fiqih sosial, laki-laki lebih dominan dan mengatur tata kehidupan ini dalam standar laki-laki yang acap kali berubah setiap saat, bergantung kepentingan

¹⁴ Masdar F.Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hal. 14.

¹⁵ Dadang S. Anshori, *Membincangkan Feminisme* , (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), Hal. 3.

gender ini. Sementara kaum perempuan dipaksa menyesuaikan diri dalam batas-batas laki-laki.¹⁶

Inilah yang menyebabkan ketidakberdayaan (*powerless*) kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan Indonesia.

Penafsiran ayat-ayat tentang perempuan dalam Al-Qur'an semua ini sering tekstual dan masih mengandung bias laki-laki.¹⁷ Tidak heran kalau interpretasi tersebut mendorong posisi perempuan menjadi marginal. Pada hal kalau dikaji secara mendalam, hal itu tidak pernah diajarkan oleh Islam. Karena dasar ajaran Islam adalah moral, keadilan dan kemanusiaan, serta tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan.

Interpretasi-interpretasi tersebut seharusnya dipahami berdasarkan pada semangat zamannya, artinya bahwa perubahan zaman dan perbedaan budaya menuntut adanya reinterpretasi yang lebih mencerminkan keseluruhan seruan agama yang universal.¹⁸ Sebagai ilustrasi ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian.

1. Menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan martabat yang tidak

¹⁶ *Ibid*, hal.4.

¹⁷ Buletin sehat P3M, tahun 2000.

¹⁸ Ruhaini Dzuhayatin, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), hal. 67.

subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu subordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang dimasyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan seperti ayat Tuhan dalam Alqur'an Surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجرات: ١٣)

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.¹⁹

Ayat-ayat yang mendukung antara lain dalam surat at Taubah ayat

71, an Nisa' ayat 123, Ali Imron ayat 195, an Nahl ayat 97.

2. Pemahaman yang bias gender selain meneguhkan subordinasi kaum perempuan juga membawa akibat pada persoalan waris dan kesaksian dimana nilai kaum perempuan dianggap separuh dari laki-laki.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Cipta Surya Aksara , 1993), hal. 847.

3. Segenap ayat yang berkenaan dengan hak reproduksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak bereproduksi maupun reproduksi yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka. Untuk itu usaha untuk menafsirkan kembali agar terjadi keadilan gender dalam hak-hak reproduksi perempuan perlu mendapat perhatian.²⁰

Dalam menghadapi kondisi perempuan yang demikian maka muncullah lembaga-lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial yang berkonsentrasi pada perempuan salah satu diantaranya adalah YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat).

YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat) merupakan organisasi otonom dari induknya Fatayat NU yang memiliki bidang garap pemberdayaan perempuan dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap persoalan-persoalan perempuan. Secara historis organisasi ini berdiri tanggal 9 Desember 1991, dan bertempat di jalan Modang Mantri Jeron III / 424 Yogyakarta, yang orientasi program pembinaannya tertuju pada segmen perempuan.

YKF sebagai salah satu organisasi atau dengan istilah lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu alternatif yang dapat menjembatani persoalan di atas, yang memiliki kepedulian untuk mengatasi ketimpangan hak-hak reproduksi dan hak-hak politik perempuan. YKF yang

²⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hal. 137.

secara spesifik menangani persoalan hak-hak reproduksi dan hak-hak politik perempuan. Pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan ke arah penguatan hak-hak politik dan reproduksi perempuan. Dan ini merupakan *strategic planning* YKF atas dasar asumsi bahwa penguatan hak-hak reproduksi dan politik perempuan akan secara signifikan berpengaruh pada penguatan hak-hak perempuan yang lainnya.

YKF mempunyai dua mitra (*stake holder*), kelompok NU dan pesantren, karena keduanya merupakan institusi keagamaan di Indonesia yang cukup berperan dalam menghidupkan interpretasi atas teks-teks agama dan fikih yang diskriminatif. Selanjutnya YKF melakukan sosialisasi gender dengan kaca mata Islam (rekonstruksi atas teks-teks agama).

Sebagai organisasi sosial keagamaan perempuan banyak agenda yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Persoalan-persoalan yang ada pada diri perempuan menjadi fokus perhatian YKF, yang mana persoalan-persoalan perempuan yang digarap oleh YKF adalah juga bagian dari persoalan sosial yang berkembang di masyarakat (khususnya masyarakat Yogyakarta). Bentuk usaha pemberdayaan perempuan yang diadakan organisasi ini adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyangkut bidang pelayanan dan pendidikan. Aktivitas-aktivitas tersebut dimaksudkan untuk membina dan memberdayakan perempuan dalam menghadapi hidup dan kehidupan.

Pendidikan atau pelatihan gender merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini dalam rangka membina perempuan yang berkualitas. Kegiatannya ini dilakukan secara intensif pada setiap tahunnya. Sedangkan program lain seperti penguatan hak-hak reproduksi perempuan terimplementasi dalam workshop dan kajian rutin bagi *badal* Kyai/Nyai pesantren di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Tema-tema reproduksi yang merupakan hasil dari kajian-kajian ini dilakukan penerbitan dalam bentuk buku saku. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan kesadaran gender bagi perempuan dan masyarakat secara umum.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan YKF terpusat di daerah Gunung Kidul termasuk pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan ini meliputi; layanan kesehatan ibu, anak dan konsaling kesehatan reproduksi.

Melihat bentuk dan hasil kegiatan yang dilakukan organisasi YKF di atas, penulis tertarik untuk mengkaji usaha organisasi tersebut dalam sebuah penelitian.

C. PERUMUSAN MASALAH

Agar lebih terperinci dan tidak melenceng jauh dari tema pembahasannya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh YKF di Pondok - pondok Pesantren Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh YKF di Pondok Pesantren DI. Yogyakarta ?
3. Bagaimana pandangan kalangan pesantren terhadap adanya ide pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh YKF tersebut ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh YKF di Pondok Pesantren D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan Oleh YKF di Pondok Pesantren D.I. Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pandangan kalangan pesantren terhadap adanya ide pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh YKF.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Dengan mengetahui pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh YKF di DI. Yogyakarta, diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan berupa informasi ilmiah tentang realitas kehidupan perempuan dan upaya pemberdayaannya.

2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran sebagai langkah awal penyadaran bagi perempuan khususnya dan bagi semua umat manusia tentang posisi kemanusiaan yang tidak membedakan gender (*gender in equality*).

F. KERANGKA TEORITIK

Teori sebagai pegangan pokok secara umum dalam penelitian harus dipahami sebaik-baiknya oleh seorang peneliti, karena teori adalah aktivitas mental untuk mengembangkan ide yang dapat menerangkan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi yang pada akhirnya menghasilkan data baru dan berguna.²¹

1. Tinjauan Tentang Teori Fungsionalisme Struktural

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fungsionalisme Struktural. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalamnya. Dan menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan akan mempengaruhi bagian lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap

²¹ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 1.

yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.²²

Beberapa tokoh utama pengembang dan pendukung teori fungsionalisme struktural pada zaman modern antara lain Talcott Parsons, Robert K. Merton dan Neil Smelser. Menurut Robert K. Merton Teori Fungsionalisme Struktural dalam menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mendasarkan pada tujuh asumsi.²³

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari berbagai bagian, dan berinteraksi.
2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis dimana penyesuaian yang ada tidak terlalu banyak merubah sistem sebagai suatu kesatuan yang utuh
4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karena di masyarakat timbul ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ketegangan dan penyimpangan ini dapat dinetralisir lewat proses pelembagaan.
5. Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses dan penyesuaian

²² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 25.

²³ Robert H. Laurer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1993), hal.

6. Perubahan adalah suatu penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi
7. Sistem diintegrasikan lewat nilai-nilai yang sama.²⁴

Berkaitan dengan maraknya isu perempuan melahirkan LSM-LSM yang memfokuskan perhatian pada perjuangan hak-hak asasi perempuan, perlawanan kekerasan terhadap perempuan dan gerakan perempuan lainnya. Pada hakekatnya gerakan yang dilakukan LSM perempuan sangat berhubungan dengan isu gender. Gender berasal dari bahasa Inggris “*gender*” yang berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep yang menuju pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Sedangkan perspektif gender adalah untuk membedakan segala sesuatu yang normatif dan biologis dan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk proses kesepakatan normatif dan sosial yang dapat ditransformasikan. Dengan pengkajian sistematis, peranan, hubungan dan proses difokuska pada kesetaraan dalam kekuasaan, kekayaan dan beban kerja antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan masyarakat.²⁵ dimana dengan banyaknya peristiwa kekerasan, penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan semakin mempertebal semangat di kalangan LSM perempuan untuk

²⁴ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 25.

²⁵ Dadang S. Ansori, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), hal. 24.

senantiasa memperjuangkan nasib kaum perempuan. Gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi disebut dengan Feminisme.²⁶ Para feminisme menegakkan kembali hak-hak perempuan yang sebenarnya dijamin oleh al-Qur'an, misalnya hak atas kesetaraan dan keadilan, hak-hak dalam perkawinan atau perceraian, hak untuk membangun martabat individual sebagai perempuan sehingga soal-soal hukum personal atau keluarga Islam yang menurut kacamata feminisme ini perlu diperbaharui sesuai dengan martabat individual perempuan itu sendiri.²⁷ Feminisme sendiri terbagi atas dua aliran besar yaitu aliran Fungsionalisme struktural dan aliran Konflik.

Fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme adalah madzhab arus utama (*mainstream*) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert K Merton dan Tolkott Parsons. Secara abstrak Parsons membuat konseptualisasi dua sosial, yaitu mekanisme sosialisasi dan pengendalian sosial. Mekanisme Sosialisasi dipandang sebagai pola pola kebudayaan yang menjiwai sistem kepribadian sehingga membatasi struktur kebutuhan. Disamping itu mekanisme sosialisasi juga memberikan landasan yang stabil dan keamanan bagi hubungan-hubungan interpersonal sehingga pengendalian sosial berhubungan dengan cara

²⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 79.

²⁷ Budi M. Rahman, "Islam dan feminisme : dari Sentralisme kepada kesetaraan" dalam Mansyur Fakih (et. Al), *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 205.

mengorganisasi peranan dalam sistem sosial untuk mengurangi tekanan dan penyimpangan.²⁸

Sedangkan Robert K Merton secara umum beranggapan bahwa penyusunan teori fungsional secara potensial dapat menyajikan tiga postulat yang menjadi pertanyaan yaitu :

1. Persatuan fungsional sistem-sistem sosial
2. Sifat universal dari unsur-unsur sosial
3. Manfaat unsur-unsur fungsional bagi sistem-sistem sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, analisis fungsional harus merinci sebagai berikut :

- 1 Pola-pola sosial yang diteliti, baik yang merupakan keseluruhan ataupun bagian-bagiannya.
- 2 Berbagai variasi tipe akibat pola-pola tersebut bagi persyaratan ketahanan yang ditetapkan secara empiris.
- 3 Proses melalui dimana suatu pola timbul dan mempunyai akibat bagi unsur-unsur sistem.

Teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Tolkott Parsons ini menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni, sehingga dapat menjelaskan posisi mereka. Oleh karena itu harmoni dan integrasi di

²⁸ Soejono Sukanto , *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. 43.

pandang sebagai fungsional dan harus senantiasa di pertahankan.²⁹ Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat harus dijaga dari goncangan dan menghindari adanya perubahan, yang mengakibatkan kurang peka terhadap aspek paksaan dan konflik dari segala bentuk kekuasaan.³⁰

Merton berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti : peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya pada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Oleh karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka Merton mengajukan pola satu konsep yang disebutnya Disfungsi. Sebagaimana struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan terhadap fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya dia dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif. Dari uraian di atas terlihat bahwa suatu pranata atau institusi tertentu dapat fungsional bagi suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya disfungsional bagi unit sosial yang lain. Dalam contoh di atas, pemberdayaan itu fungsional bagi perempuan tetapi mungkin disfungsional bagi masyarakat yang

²⁹ Mansour Fakih , *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 80.

³⁰ *Ibid*, hal. 81.

mengagungkan budaya patriarki. Selanjutnya Merton mengatakan tentang sifat dari fungsi yang terdiri atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan (*intended*), yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Jadi sangat jelas akan fungsional bagi perempuan, sedang fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan, di mana pemberdayaan terhadap perempuan akan cukup mengganggu eksistensi laki-laki.

2. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar “daya” kemudian menjadi “berdaya” yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan dan kekuasaan.³¹ Atas daya-daya yang ada pada diri manusia. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk me *mampu* kan, menguatkan daya-daya yang ada pada diri manusia, atau pada formulasi berbeda namun esensinya sama merubah dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya. Yakni suatu kondisi dimana seseorang mempunyai kekuatan dan kemampuan baik secara intelektual, spritual, ketrampilan ataupun material sehingga mampu melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya.

Menurut Quraish Shihab terdapat empat daya manusia yang dianugrahi Allah, yakni : (1) daya tubuh, yaitu yang menunjang

³¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Pres, 1991), hal. 323.

kekuatan fisik manusia (berfungsi organ tubuh dan panca indera) ; (2) daya hidup, yakni yang menjadikan manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan menghadapinya untuk mempertahankan hidup ; (3) daya akal, yaitu untuk memungkinkannya mempunyai pengetahuan dan ketrampilan ; (4) daya kalbu yaitu di mana manusia dapat merasakan bermoral dan merasakan keindahan.³²

Sedangkan menurut Srilata Bathwala daya yang ada dalam diri manusia meliputi aset material, sumber-sumber intelektual dan ideologi. *Pertama*, material , biasanya aset ini berhubungan dengan tubuh dan kebutuhan manusia seperti kebutuhan hidup, makan, minum dan kesehatan. *Kedua*, intelektual berupa pengetahuan informasi atau pun ide. *Ketiga*, ideologi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, menyebarkan, mempertahankan dan *mempranatakan* perangkat-perangkat tertentu dari kepercayaan, nilai, sikap dan prilaku sehingga dapat menentukan persepsi masyarakat (manusia dan fungsinya dalam lingkungan sosial, ekonomi dan politik).³³

Dengan demikian pemberdayaan dalam Islam adalah usaha untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi yang ada pada manusia secara utuh, baik itu unsur intelektualitas, kepribadian dan

³² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), hal. 281.

³³ Mely G Tam, *Perempuan dan Pemberdayaan*, (Jakarta : Obor, 1997), hal. 9.

ketrampilannya. Pemberdayaan intelektual yaitu dengan menggunakan kemampuan akal semaksimal mungkin untuk mengetahui ayat-ayat Tuhan (Kauniyah maupun Kauliyahnya). Sedangkan kepribadian berarti mengembangkan daya rohani untuk menguatkan keimanan dan menentukan untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya tanpa pengaruh dari luar dirinya (kemandirian) sehingga seseorang mempunyai kepercayaan diri (*self confidence*). Keterampilan yaitu mengembangkan kreatifitas yang ada pada diri manusia untuk dapat menyesuaikan dan mengembangkan diri dalam lingkungannya.

Usaha memberdayakan manusia ini karena tidak semata-mata manusia tidak berdaya dengan sendirinya.³⁴ akan tetapi ketidakberdayaan dapat ditimbulkan oleh beberapa pihak termasuk manusia dan sistem yang ada disekitarnya, seperti masyarakat miskin karena sistem perekonomian yang dimonopoli oleh beberapa pihak saja.

Dengan demikian upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya bersifat individualistik akan tetapi ada unsur kolektifitas dengan pemberdayaan manusia di sekitarnya. Upaya pemberdayaan manusia menurut pranaka tidak hanya dilakukan untuk kepentingan individual

³⁴ Konsep ini berawal dari determinisme kemerdekaan dan individu, dimana dirasa sebagai sumber terjadinya proses dehumanisasi terhadap mereka yang tidak kuat, baik dalam bidang ekonomi, hukum maupun politik. Dengan kata lain orang menginginkan terjadinya proses “depowement” dari sistem yang ada dan menggantikannya dengan “impowerment” dari sistem alternatifnya. A. M. W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996), hal. 49

akan tetapi menyangkut kepentingan kolektif, dan semua proses pemberdayaan itu bagian dari aktualisasi dan ko-aktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Maka apabila kita ingin meningkatkan kemampuan manusia bukan berarti mengambil kesempatan yang dimiliki orang lain atau untuk mengatakan kemampuan untuk melawan orang lain.

Jadi pemberdayaan merupakan pengembangan seluruh aspek potensi yang ada dalam diri manusia secara optimal, dan tetap menempatkan manusia pada posisi kemanusiaannya (terjadi *humanisasi*), baik itu secara individu dan kolektif. Pemberdayaan meliputi perseorangan dan kelompok dengan memberdayakan manusia disekitarnya.

b. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan berarti upaya pemberian kekuatan dan kemampuan bahkan kekuasaan terhadap potensi yang dimiliki perempuan agar dapat di aktualisasikan secara optimal dalam prosesnya tetapi menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya.³⁵ Untuk mewujudkan upaya pemberdayaan.

Sementara itu Mely G tan lebih menitik beratkan pemberdayaan perempuan pada aspek kekuasaan, dengan mengatakan

³⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh pranaka bahwa pemberdayaan memungkinkan seseorang pribadi mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dan mengarah pada penyempurnaan fitrahnya sebagai manusia, dalam majalah BASIS No. 03/04/th. 46, Maret-April 1997.

bahwa penekanan pemberdayaan sebagai proses adalah mempertanyakan pola hubungan yang ada serta memperoleh pola hubungan yang lebih seimbang. Ketidakberdayaan perempuan selama ini erat kaitanya pendistribusian kekuasaan yang lebih dominan kepada laki-laki dari pada kaum perempuan. Disini pemberdayaan memungkinkan perempuan untuk mendapatkan sumber-sumber material maupun non material.³⁶

Pemberdayaan perempuan terkait juga dengan pemampuan perempuan yaitu upaya untuk memberikan kemampuan kepada individu agar dapat mengendalikan, mengatur dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.³⁷ Pemberdayaan dengan konsep pemampuan lebih memfokuskan pada kontrol internal kaum perempuan bukan “menentang” kaum pria yang selama ini mendominasi, namun meluruskan konsep yang diterjemahkan dengan pola hubungan yang menempatkan perempuan tidak berdaya.

Dilihat dari berbagai definisi diatas, tujuan pemberdayaan perempuan bukan untuk menjadikan perempuan lebih unggul dari laki-laki atau menentang terhadap laki-laki akan tetapi menjadikan perempuan berdaya untuk dapat menentukan pilihan dalam kehidupan serta ikut andil dalam perolehan sumber-sumber material maupun non

³⁶ Mely G. Tan, *Perempuan dan Pemberdayaan*, (Jakarta : Obor, 1997), hal. 9.

³⁷ E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*, (Jakarta : Obor, 1997), hal. 361-362.

material yang selama ini belum mereka dapatkan.³⁸ Tujuan pemberdayaan dengan “tidak melawan” juga membagi peran (mitra) laki-laki atau orang di sekitarnya. Ini yang dimaksud tujuan kolektif pemberdayaan dan tidak individualis.³⁹

Dalam operasionalisasi pemberdayaan perempuan ada dua hal yang perlu dilakukan.⁴⁰ *Pertama*, dalam proses pemberdayaan hendaknya menekankan proses pendistribusian kemampuan, kekuatan dan kekuasaan kepada perempuan secara seimbang agar mereka lebih berdaya. Dalam mewujudkan hal ini perlu merubah struktur dan kultur yang menghambat pemberdayaan perempuan yang selama ini telah mendistribusikan komponen di atas secara tidak seimbang (*inequality*), yang didukung dengan aset material. Langkah tersebut akan mempengaruhi kebutuhan strategis kaum perempuan untuk melakukan *bergening position*. Untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut dibutuhkan aset material atau kebutuhan praktis perempuan seperti meningkatkan pendapatan ekonomi. *Kedua*, dengan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi kaum perempuan agar berdaya dan mandiri dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

³⁸ Bagong Suyanto dan Emi Hendarti H, *Pemberdayaan dan Kesenjangan Perempuan*, dalam majalah Prisma edisi 5 Mei 1996.

³⁹ DEPAG RI, *Op. Cit*, hal.122.

⁴⁰ Pengklasifikasian langkah di atas tidak bersifat kaku karena keduanya saling terkait dan melengkapi, bahkan aplikasinya dapat dilakukan bersamaan.

Dalam penjelasan mengenai pemberdayaan perempuan menjadi hal yang niscaya karena selama ini perempuan benar-benar dalam keadaan yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan selama ini karena perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang tidak berdaya atau lemah dibanding laki-laki dengan dalih ketidak berdayaan inilah kemudian perempuan mendapat perlakuan yang berbeda (*diskriminatif*) sehingga kesempatan ini memungkinkan mereka (kaum perempuan) untuk dapat berkembang terhambat.

Pemberdayaan dimaksudkan sebagai penguatan baik dari segi fisik maupun mental kaum perempuan secara umum baik dalam bidang politik maupun kesehatan terutama terkait dengan hak reproduksi.

Pemberdayaan politik perempuan diartikan sebagai meningkatnya kontrol perempuan atas kehidupan mereka di dalam maupun di luar rumah agar mereka dapat memperbaiki lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk membentuk kehidupan mereka dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang stabil dan bebas konflik⁴¹ Sedangkan pemberdayaan dalam bidang kesehatan, bagaimana perempuan memiliki kebebasan dalam mengatur fungsi reproduksi, kapan dan bagaimana dia melahirkan.

⁴¹ Sri Budi Eko, Wardani, *Aspirasi perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hal. 18.

Secara umum bahwa yang di maksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Hak tersebut mencakup tiga hal :

1. Hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan umum dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden, dan hal-hal yang mengandung pertemuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Jadi yang dimaksud hak politik perempuan ialah hak perempuan sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi di dalam menentukan kebijaksanaan politik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sedangkan hak-hak reproduksi perempuan antara lain :

1. Hak memilih pasangan .
2. Hak menentukan kehamilan
3. Hak menentukan keinginan menyusui atau tidak terhadap anaknya.
4. Hak mengatur jumlah anak.⁴²

⁴² Lestari Ratih dan Soejono Soekanto, *Fungsionalisme dan teori konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 1988), hal. 35.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menurut Saparinah sadli menggurai perspektif yang ada pada dasarnya mencerminkan pemikiran feministik, seperti:

1. Perempuan perlu di terima dan di hargai sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi (kemampuan untuk berkembang)
2. Karakteristik tentang perempuan sebagai sosok yang tidak kompeten, lemah, tidak mandiri lebih merupakan konstruk budaya dan karenanya diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang inteligen, mandiri, sukses, etis dan ciri lain yang positif.
3. Perempuan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kondisi lingkungan hidupnya dan mungkin ikut memberi arah pada perkembangan sosial, ekonomi, politik dan pribadi.
4. Berbagai kualitas manusia yang dapat mendukung terciptanya kualitas hidup positif, perlu dikembangkan dalam diri perempuan dan laki-laki.
5. Berbagai kepercayaan dan sikap yang berlaku bagi perempuan banyak dipengaruhi oleh mitos dan stereotipe yang berlaku pada perempuan dan bahwa pengaruh sosial budaya yang merugikan perkembangan status dan diri perempuan tersebut dapat diubah. Dengan kata lain pemikiran feministik didasari oleh adanya anggapan tentang distorsi tentang apa dan siapa perempuan.

Dalam konteks di atas, pemberdayaan dimaksudkan sebagai penguatan baik dari segi fisik maupun mental kaum perempuan secara umum.⁴³

Pemberdayaan kaum perempuan juga sangat mengedapankan persoalan kemandirian kaum perempuan, agar tidak terlalu tergantung kepada kaum laki-laki dan agar sumber daya (potensi dan kemampuan) yang dimiliki perempuan dapat diaktualisasikan secara maksimal. Kemandirian yang sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan yang lahir dan kemandirian berpikir, lahir dari visi bahwa perilaku kita adalah produk pilihan sadar yang berdasarkan nilai, bukan produk dari kondisi dan pengkondisian. Dengan demikian, kaum perempuan yang mandiri boleh saja memilih menjadi Ibu rumah tangga yang sepenuhnya menghabiskan waktunya dirumah untuk mengurus anak dan suami, bukan karena tuntutan atau turun temurun yang digariskan adat, penafsiran agama, atau apa saja, tetapi karena memang itu adalah prioritas utamanya, pilihan yang ditetapkannya berdasarkan prinsip hidupnya. Perempuan juga bisa memilih berkarir, bukan karena ingin dikatakan wanita yang maju dan mandiri semata, tetapi karena pilihan dasar yang dibuat berdasarkan visi yang dibuat berdasarkan visi yang bertanggung jawab. Perempuan juga ikut

⁴³ T.O. Ihromi dalam Saporinah Sadli, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 24.

berorganisasi bukan di karenakan jabatan suaminya, tetapi karena kebutuhan dirinya untuk mengembangkan potensi dan kemandirian.⁴⁴

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan

a. Faktor Pendukung

1. Datangnya era informasi yang didukung oleh kemajuan transpormasi. Hal ini telah membukakan peluang dan kesempatan bagi perempuan bersama lelaki untuk membuka wawasan berfikir mereka.
2. Perkembangan dan kemajuan teknologi.
3. kemajuan dalam bidang kontrasepsi
4. Adanya kelompok-kelompok kajian dimasyarakat yang mengkaji tentang keperempuanan baik yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun masyarakat.
5. Banyaknya perempuan yang terjun dalam dunia publik.
6. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan.⁴⁵

b. Faktor Penghambat

1. Hambatan fisik perempuan, bahwa perempuan dibebani tugas kodrat yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan

⁴⁴ Ariyana Wahidah Fuad, Relevansi Gerakan Feminisme Dalam Konsep Pendidikan Islam, dan Hj. Mursyidah Thahir (ed), *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000), hal. 79.

⁴⁵ Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan ?* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 16-17.

ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus-menerus dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Hambatan teologis, perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki.
3. Hambatan sosial budaya, pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung dan menerima keadaan.
4. Hambatan sikap pandang, hambatan ini dumunculkan oleh pandangan dikotomistis antara tugas perempuan dan lelaki.
5. Hambatan historis, kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidak mampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya lelaki.⁴⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah informan tempat memperoleh keterangan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Direktur yayasan beserta pihak-pihak terkait lain, diantaranya devisi pengkajian dan pelatihan yang dapat membantu penelitian dalam mengumpulkan data dan sebagai sumber data. Sedangkan obyek penelitiannya adalah aktifitas yang dilakukan Yayasan dalam

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 18.

pemberdayaan perempuan pada penguatan hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan di pondok pesantren Yogyakarta.

- b. Perwakilan Nyai dan santri yang pernah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh YKF pada keempat pondok pesantren yaitu pondok pesantren Ali Maksum, Wahid Hasyim, Nurul Ummahat dan Al-Barokah.

2. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta dengan pertimbangan untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas, maka metode pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview atau wawancara, yaitu tahap pengumpulan data berupa tanya jawab secara berhadapan langsung dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dan direncanakan.⁴⁷ Akan tetapi kemungkinan juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Adapun pihak yang diwawancarai adalah beberapa pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti seperti Direktur yayasan, devisi pengkaderan dan pelatihan serta pihak lain yang dapat memberikan informasi dan, perwakilan Nyai dan santri.

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1979) hal. 174

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen ⁴⁸ yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, brosur dan lain-lain.

Penyusun menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip berupa catatan program dan kegiatan yayasan, artikel-artikel, laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, laporan surat resmi, tentang yayasan serta program-program tertulis lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

3. Pengolahan dan Analisa data

Dalam analisa data dibagi dalam dua tahapan :

- a. Teknik analisa data, yakni mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dibaca dan kemudian diinterpretasikan.⁴⁹ Dalam analisa ini peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dimana dalam analisa peneliti menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan di pesantren yogyakarta yang dilakukan oleh YKF. Adapun analisa data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara, *pertama*, dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, *kedua*, dilakukan setelah pengumpulan data.

Setelah analisa data selesai, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dari sumber data

⁴⁸ Husaeni Lisman dan purnomo Setya Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet III, 2000), hal. 73.

⁴⁹ Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1988), hal. 419.

sesuai dengan metode yang digunakan yaitu interview atau wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari Direktur YKF dan dari informan pendukung untuk mendiskripsikan pemberdayaan perempuan di pesantren oleh YKF. Dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis dan terperinci sebagaimana yang diperlukan dalam perumusan permasalahan penelitian.

b. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengukur keobyektifan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tehnik triangulasi.

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data yang terkumpul kemudian dicek kebenarannya melalui sumber lain, yaitu dengan cara menanyakan pada orang di luar responden yang di anggap mengetahui permasalahannya.

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan adalah:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan direktur yayasan sebagai informan utama dengan informan lainnya.
2. Membandingkan antara apa yang dikatakan informan utama secara pribadi saat dilakukan wawancara.
3. Membandingkan hasil wawancara peneliti dengan informan secara keseluruhan dengan isi dokumen yang berkaitan.⁵⁰

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 178.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan secara keseluruhan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan perempuan merupakan pengembangan seluruh potensi manusia (*intelektual, spiritualitas dan ketrampilan*) dan menempatkan manusia pada posisi kemanusiaanya (*humanisasi*) yang dilakukan secara individu maupun kolektif.
2. Bentuk pemberdayaan perempuan di pondok pesantren Yogyakarta berupa penguatan hak-hak politik perempuan dilakukan dengan cara penyusunan kurikulum tentang fiqh siyasah di pondok pesantren dan penguatan hak-hak reproduksi perempuan dilakukan dengan cara mengadakan kajian intensif bagi badal Nyai dan Kyai di pesantren.
3. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan
 - a. Faktor pendukung pemberdayaan perempuan
 1. kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya pemberdayaan perempuan sehingga menjadikan mereka berpartisipasi aktif untuk melancarkan dan mengembangkan pemberdayaan perempuan tersebut. Sebagai bukti keaktifan mereka dalam mengikuti program kerja yang diselenggarakan di pondok pesantren.

2. loyalitas pemimpin yayasan menjadikan mereka tidak pernah merasa bosan dan lelah meskipun banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi.
 3. hubungan kerja sama yang baik antara yayasan dengan masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan dapat memperlancar terealisasinya program kerja yang direncanakan.
 4. sistem pengelolaan yang baik di yayasan menjadikan masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan yayasan tersebut.
- b. Faktor penghambat pemberdayaan perempuan
1. Image masyarakat mempengaruhi adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan gender (*gender difference*), sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam bentuk; marginalisasi, subordinasi, stereotype, violence dan beban ganda yang disosialisasikan melalui keluarga masyarakat maupun negara.
 2. Media massa elektronik maupun cetak menjadi bagian penting bagi manusia untuk mengakses berbagai informasi. Posisi dan peran perempuan disini masih digambarkan eksploitatif, yaitu sebagai akibat dari dominasi laki-laki, sehingga ke-objektifitasannya hilang sehingga menempatkan kedudukan perempuan pada posisi yang diskriminatif.
 3. Interpretasi teks terjadi bias karena : (1). Dalam penafsiran ayat lebih menggunakan pendekatan teologis daripada sosiologis, (2).

Kebanyakan penafsiran (mufasir) banyak dilakukan oleh laki-laki.

Hal ini dapat dilihat dari penafsiran QS. An-Nisa' : 4 ; 1 dan 34.

4. Pandangan kalangan pesantren terhadap adanya ide pemberdayaan perempuan

Pada umumnya Nyai pada empat pondok sangat menyetujui adanya ide pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat, mengingat laki-laki dan perempuan memiliki potensi sebagai karakteristik kualitas khas insani untuk diaktualisasikan. Dari sini sehingga tidak ada pembedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam setiap kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya mengingat setiap orang memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri sebagaimana potensi yang dimiliki dalam bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya tanpa menafikan seorang perempuan sebagai mana kodratnya.

B. Saran-saran

Dalam pemberdayaan perempuan perlu adanya kesatuan paradigma baik dari laki-laki maupun perempuan, bahwa pemberdayaan perempuan merupakan mitra sejajar laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban adanya kesetaraan dan keadilan bagi insani dalam semua segi kehidupan maka berkaitan dengan itu perlu saran-saran :

1. Diharapkan Yayasan Kesejahteraan Fatayat melakukan pelatihan penyadaran gender tidak hanya bagi badal Nyai dan santri, akan tetapi

menjadi penting bagi seluruh kepengurusan pesantren agar sosialisasi pemasyarakatan penyadaran gender merata kepada seluruh jajaran kepengurusan pesantren dan pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang di ambil tidak bias gender.

2. Diharapkan bentuk dari kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan sebuah upaya penguatan hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak-hak perempuan lainnya dan dapat di perluas bagi organisasi-organisasi yang mempunyai konsen yang sama dalam pemberian penyadaran kepada masyarakat akan perlunya penyadaran gender.
3. Diharapkan Nyai sebagai salah satu orang yaitu bertanggung jawab secara moril dalam memberdayakan perempuan menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pesantren, hendaknya lebih terbuka dalam membahas permasalahan gender yaitu dimulai dari bangunan wacana tentang hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan.
4. Bagi masyarakat perlu mengubah anggapan yang menempatkan perempuan secara diskriminatif dari pada laki-laki. Sementara negara dapat menentukan kebijakan yang bernuansa keadilan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) baik dalam politik hukum, maupun ekonomi, interpretasi teks merupakan agenda keagamaan yang membuat posisi dan perannya terhambat yang perlu di kaji ulang (dekonstruksi dan rekonstruksi).

Saran Tambahan

a. Aktivitas Perempuan

1. Khususnya bagi feminis Islam, hendaknya dapat merangkul warga pesantren dalam mengembangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, karena sesungguhnya dunia pesantren tidak tertutup apa yang dibayangkan dari luar, namun banyak hal unik yang diterapkan di dalamnya untuk dapat diterapkan konsep pemberdayaan perempuan yang sesuai di pesantren.
2. Penelitian tentang pemberdayaan perempuan perlu dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai tinjauan.

b. Civitas Fakultas Dakwah

1. Sebagai civitas yang dibekali keilmuan, hendaknya dapat pula memahami lebih jauh tentang bahasan pemberdayaan, baik pemberdayaan perempuan dan laki-laki secara keilmuan maupun praktis. Karena kelak dibutuhkan dalam menghadapi masyarakat dan terciptanya wacana yang adil antara laki-laki dan perempuan.
2. Bagi yang tertarik dalam penelitian tentang penguatan hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan, maka dapat ditinjau lebih jauh tentang perkembangan gender melalui media lain, seperti media massa/elektronik, media cetak.
3. Sebagai kelanjutan penelitian ini, perlu dikembangkan lebih jauh perkembangan tentang pemberdayaan perempuan di

pesantren melalui sudut pandang paradigma berpikir para santri tentang gender.

C. Penutup

Segala puji syukur pada Rabbi yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti khususnya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada semua hamba-Nya.

Terselesainya penelitian ini tiadalah artinya tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam segala rupanya dan semoga dapat bermanfaat, baik sebagai tambahan wacana maupun sebagai gambaran praktis kedepan. Akhirnya *Jazakumullah khairan katsiran* peneliti sampaikan pada semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Ariyana Wahidah Fuad, *Relevansi Geraka Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam, dan Hj. Mursyidah Thahir (ed), Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: PP. Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Anderson, M.I., *Thinking About Women Sociological Prespectives On Sex and Gender*, London : Macmillen Publishing Company, 1983.
- Anshori, S. Dadang, *Membincangkan Feminisme*, Bandung : Pustaka H idayah, Cet. I, 1997.
- Ali Engineer, Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta : Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) cet. II , 2000.
- Badudu, J.S. dan Sutan M. Zain, *HUBI* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Baidhowi, Zakiyudin, *Perspektif Agama-Agama , Geografis, Teori-teori Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Bashin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, Yogyakarta : Bentang, 1993.
- Buletin “ Suara RAHIMA” , Yogyakarta, No. 1 edisi Mei 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet 11, 1989.
- Dhofir Zamaksyari, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993.
- Djamil, Abdul, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta : Gama media Cet. I, 2002.
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

- _____, *Membincangkan Feminisme*, Surabaya : Risalah Gusti, cet. I, 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta : Yasbib, Fak. Psikologi UGM, 1980
- Indrasari, Tjandraningsih, Studi Mengenai Pendampingan Masyarakat Pekerja Anak Marjinal. Surya Mulandar (ed), Bandung : Yayasan Akatiga, 1995
- Lisman, Husaeni dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, cet III, 2000
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1993
- Lauer HR, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, Penerbit: Rineka Cipta, 1993.
- Laporan Pertanggungjawaban Program YKF, Yogyakarta, Periode 1999-2002.
- Majalah, *Fatayat Welfare Foundation*, Yogyakarta : YKF, Email : ykfjogja @ indosat.net.id
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, Cet. X. 1999.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan berbeda ?*, Bandung : Mizan, Cet. I, 1999.
- Munir, Lily Zakiah, *Memposisikan Kodrat*, Bandung : Mian, cet. I. 1999.
- Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, Cet. I, 2001.
- Prijono, Oni S, 1996, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi* , Jakarta : centre for strategi and International Studies (CSIS)
- Raharjo, M. Dawam, *Dunia Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta : LP3ES, V, 1995.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* Jakarta, Rajawali Pers, 1992
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996
- Sukanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 1988.

- Soebahar , Hamdanah Utsman, *Hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Kyai*, Yogyakarta : Pusat Penelitian UGM, Cet. I, 1999.
- Sarapung, Elga, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 1999
- _____, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Cet. I. 1999.
- Tamagola, Tamrin Amal, *Citra Wanita dalam Iklan dalam Majalah Wanita Indonesia*, Edisi : xxii, 1997.
- Tan, Melly G. 1991, *Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa depan ?* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kartasasmita, Ginanjar *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Penerapan*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 1996
- Yustina, Rustiawati, *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta : Penerbit Obor, 1997
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta, Tiara wacana, 1992.
- Zaenab, Siti. *Nyai, Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta : YKF , Cet. I, 2002.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial (Terj.)*, Jakarta : P3M, Cet. I, 1986.